

Pers Negara Bertetangga

Nunung Prajarto^{*)}

Abstract:

(Press Between Two Neighbouring Countries) Cultural differences between the Indonesian and Australian media sometimes create complaints and tensions. While the Australian media are generally regarded as being aggressive, fond of conflict, eager to get to the core of issues quickly and playing "supervisory" role, the Indonesian media are portrayed as being government's microphone and leaving the fact and the truth. The problem to be discussed centre on how the various views of the neighbouring countries' press emerge. By brushing aside the reasons to rationalise and the existed opinions, this paper shows that both the Indonesian and Australian press have implemented a good professional standard of journalism.

Persamaan dan perbedaan pandangan merupakan kewajaran dalam kehidupan. Hal demikian berlaku pula dalam nafas media massa, termasuk pers, di sejumlah negara yang berdekatan secara geografis. Dalam tingkatan tertentu, pers di negara-negara Asia Tenggara bisa memberikan yang sama terhadap sebuah peristiwa yang terjadi pada salah satu negara anggota ASEAN. Di lain sisi, meskipun Indonesia dan Australia memiliki kedekatan geografis, pers di kedua negara bisa memberikan pandangan yang bertolak belakang.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji kehidupan pers Indonesia dan pers negara tetangga, khususnya Australia, untuk melihat sisi unik dan penting dari isi liputan pers dua negara tersebut dalam mewartakan hubungan mereka.

^{*)} Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Dari kajian ini akan diperoleh kejelasan bahwa perbedaan yang ada lebih didasarkan pada rasionalitas dan *public opinion*, sementara yang terjadi secara operasional berdasar standar professional jurnalistik tidaklah demikian.

Upaya pemetaan terhadap persoalan pers negara bertetangga ini akan diawali dengan mencermati hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Diharapkan, hal ini bisa memfasilitasi pemahaman terhadap peliputan pers dan tarik menarik antara sistem pers dan sikap pers terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di kedua negara.

PENTINGNYA SEBUAH PERSAHABATAN

Fluktuasi mendekat dan menjauhnya hubungan Indonesia - Australia mulai terlihat lebih sulit dan lebih rumit semenjak kasus Timor Timur (Timtim) dimasukkan ke dalam agenda publik di kedua negara. Setidaknya, seperti dinyatakan Tiffen, hal itu bisa terbaca dari perhatian pers Australia yang mendadak meninggi selama perang saudara di Timtim dari 18 Agustus hingga Desember 1975.¹ Hilangnya lima wartawan Australia — Greg Shackleton, Gary Cunningham, Tony Stewart, Malcolm Rennie dan Brian Peters — di tempat peliputan Timtim sekitar bulan Oktober 1975 dapat diduga menjadi pemertajam liputan yang terjadi.² Secara historis, mencuatnya kasus Timtim sekaligus menjadi puncak merenggangnya hubungan Indonesia dan Australia yang terbina sejak tahun 1945.

Kisah jauh-dekatnya hubungan antara Indonesia-Australia memang tidak hanya berdasar pada peristiwa Timtim belaka. Jauh sebelum tahun 1945, seperti digambarkan Macknight, hubungan baik telah dimulai sekitar tahun 1650 dengan adanya kontak antara masyarakat Aborigin dengan pelayar pendatang dari suku Bugis dan Makasar.³ Hubungan manis Indonesia dan Australia semakin terbentuk dalam periode 1945 - 1949 saat Australia membantu perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.. Namun selama 16 tahun berikutnya, hubungan tersebut sedikit menegang

¹ Rodney Tiffen, 1978, *The News from Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, hal. 162.

² Helen Hill, 1975, *The Timor Story*, Timor Information Service, Fitzroy, hal. 13.

³ Ratih Hardjono, 1993, *White Tribe of Asia*, Hyland House, South Yarra, hal. 12-14.

karena Australia tidak terlalu suka dengan sepak terjang Indonesia dalam persoalan Irian Barat (Irian Jaya, sekarang), konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan konflik NEFOS (*the New Emerging Forces*) versus OLDEFOS (*the Old Established Forces*). Bahkan konflik militer kedua negara tersebut sempat pecah di Kalimantan tahun 1963 dan di perbatasan Serawak tahun 1965.⁴

Layaknya sebuah pegas, hubungan tegang itu kemudian cenderung mereda selama satu dasawarsa awal pemerintahan Orde Baru. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru diduga menjadi sebab melunaknya sikap Australia yang berpengaruh pada membaiknya hubungan kedua negara. Puncak romantisme Indonesia - Australia terjadi saat Partai Buruh di bawah PM Gough Whitlam memegang kendali pemerintahan di Australia (1972-1975).⁵

Pertengahan kedua tahun 1975, seperti dijelaskan di depan, menjadi tahap yang sulit dan rumit. Titik awalnya berasal dari perkembangan politik yang cukup relevan di Timor Portugis dalam bulan April 1974. Meskipun tak cukup jelas apakah perkembangan itu berkaitan dengan kudeta di Lisabon, namun pendapat publik menyatakan bahwa kudeta tadi mempengaruhi pola pikir orang Timor-Timur, utamanya pihak yang tidak menyukai Portugis. Lima partai politik kemudian terbentuk di Timtim. Tercatat, *Uniao Democratica Timorese* (UDT, 11 Mei 1974) dan beberapa hari kemudian *Associacao Social Democratica de Timor* (ASDT) yang berubah nama menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (FRETILIN, 12 September 1974), *Associacao Popular Democratica Timorese* (APODETI, akhir Mei 1974), *Associacao Popular Monarquica* (Partai Monarki) dan *Associacao Trabalhadores* (Partai Buruh).⁶

Perkembangan politik ini pun pada awalnya memang tidak memperoleh perhatian besar dari media massa dunia. Baru setelah pecahnya perang saudara di Timtim yang berlanjut dengan berkoalisinya beberapa partai politik yang setuju berintegrasi dengan Indonesia untuk melawan FRETILIN, perhatian

⁴ Florentina Purwokinanti, 1997, *Sikap Pers Indonesia dan Pers Australia terhadap Hubungan Indonesia-Australia 1995*, skripsi, FISIPOL - UGM, Yogyakarta, hal. 45.

⁵ Ikrar Nusa Bhakti, "Pertemuan Akhir Pekan Soeharto-Keating", di harian *Kompas*, 16 September 1995, hal. 4.

⁶ Y.A. Nunung Prajarto, 1995, *Australian and Indonesian News Coverage of the Dili Massacre*, tesis, The University of New South Wales, Sydney, hal. 60-61.

media massa menjadi naik dengan koverasi berita lebih banyak dilakukan dari Darwin, tempat banyak pengungsi Timtim berdatangan. Hilang (terbunuh?)-nya lima wartawan Australia dalam tugas peliputan menjadikan perhatian juga terarah ke Indonesia Apalagi kemudian Indonesia mendaulat Timtim sebagai propinsi ke-27-nya.

Beberapa peristiwa lain mewarnai suasana dekat-jauhnya hubungan Indonesia dan Australia setelah peristiwa integrasi Timtim.⁷ Sejumlah perkembangan yang cukup berarti dalam hubungan bilateral menjadi “ternoda” dengan beberapa peristiwa itu. Hubungan kedua negara pada periode 1976 - 1991 sering dilabelkan dengan sebutan “hubungan yang tidak menentu”. Majalah *Tempo* pada edisi 25 April 1992 (1992: 24) mencatat tentang empat hal yang menandai tak menentunya hubungan itu. Pertama, pengusiran Warwick Beutler dari Indonesia. Visa Warwick tidak diperbarui lagi oleh Pemerintah Indonesia sejak 15 Juli 1980. Hal ini berkaitan dengan reportase *Australian Broadcasting Commission* (ABC), tempat Warwick bekerja, yang mendeskreditkan Indonesia. Sekaligus kasus ini mengakhiri operasi ABC di Indonesia yang telah dimulai pada tahun 1960-an. Kedua, tentangan tiga cabang *Australian Journalist's Association* (AJA) dari New South Wales, Victoria dan South Australia atas undangan AJA pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tiga cabang organisasi wartawan Australia itu tidak akan memberi lampu hijau pada persetujuan undangan itu sebelum adanya klarifikasi tentang peristiwa hilangnya lima wartawan mereka di Balibo tanggal 16 Oktober 1975. Ketiga, tulisan David Jenkins tentang keluarga Presiden Soeharto yang termuat di *The Sydney Morning Herald* edisi 10 April 1986. Artikel itu menyulut kemarahan Indonesia, dan berlanjut dengan penolakan permohonan visa bagi sembilan wartawan Australia yang akan meliput kunjungan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ke Bali pada akhir bulan April 1986 dan visa dua wartawan yang akan meliput kejuaraan bulutangkis piala Thomas. Keempat, berbeda dengan tiga peristiwa di atas, hubungan Indonesia-Australia sempat memanis lagi ketika sebuah artikel lain tentang keberhasilan pembangunan di Timtim mampu melunakkan sikap Indonesia. Artikel berjudul “*East Timor's War in Facts and Figures*” itu ditulis oleh Peter Hastings dan dimuat di harian *The Sydney Morning Herald* setahun setelah kasus Jenkins.

⁷ Sejumlah negara tidak memandang sebagai integrasi Timor Timur ke Indonesia tetapi sebagai aneksasi Indonesia ke Timor Timur.

Meskipun hubungan Indonesia dan Australia cenderung tidak menentu, beberapa perbaikan selalu diupayakan oleh kedua negara. Tiga faktor utama terlihat melandasi upaya perbaikan itu, yakni (1) kepentingan ekonomi dan politik Indonesia terhadap Australia *vice versa*; (2) kepentingan ekonomi dan politik Australia untuk mengukuhkan keberadaan dirinya sebagai suku putihnya Asia, dan (3) pandangan sejumlah pemimpin Australia terhadap kesenioran Presiden Soeharto. Tiga faktor yang berpengaruh itu di antaranya diaplikasikan dalam hal: (a) pembentukan sejumlah kota kembar (Semarang-Brisbane, Surabaya-Perth, serta Ujung Pandang-Darwin)⁸; (b) niat besar Perdana Menteri Australia Paul Keating untuk menjadikan Australia sebagai sebuah republik dan melepaskan diri dari Commonwealth guna memudahkan Australia masuk ke wilayah Asia⁹; serta (c) beberapa kali kunjungan Keating ke Indonesia menemui Presiden Soeharto.

Masalahnya, upaya perbaikan hubungan diplomatik itu tidak serta merta membawa hasil yang nyata dan mantap. Masalah Timtim tetap menjadi sebuah hal yang sensitif bagi kedua negara, dan dalam banyak kasus kemudian, hubungan Indonesia dan Australia berulang kali terganggu oleh isu-isu yang terkait dengan kawasan ini. Sebut saja, misalnya, “demam bersuhu tinggi” saat peristiwa Dili Nopember 1991 terjadi,¹⁰ meskipun sesungguhnya hubungan Indonesia-Australia pada waktu itu sedang berkembang dan membaik.

Pada tahun 1995, hubungan kedua negara kembali “panas-dingin” atas terjadinya beberapa peristiwa. Rangkaian peristiwa yang mewarnai hubungan bertetangga kedua negara tersebut antara lain: terbunuhnya enam warga Timtim di Liquica (bulan Januari); permohonan suaka ratusan warga Timtim kepada Australia (April); kunjungan Habibie ke Australia (Mei); pencalonan HBL Mantiri sebagai duta besar baru Indonesia di Canberra (Juni); keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Australia dalam kasus celah Timor (Juli); saling bakar bendera yang dilakukan sejumlah orang baik di Australia maupun di Indonesia (Juli dan Agustus); kunjungan PM Paul Keating

⁸ Robyn Bromby, 1993, “*Sister-State Relationship a Powerful Two-way Weapon*”, di harian *The Australian*, 24 September 1993, hal. 11.

⁹ Nunung Prajarto, 1992, “Mengapa Paul Keating Melirik Asia?”, di harian *Surabaya Post*, 1 Oktober 1992, hal. 4.

¹⁰ Y.A. Nunung Prajarto, 1993, *The Dili Massacre*, tesis, The University of New South Wales, Sydney, hal. 58-127.

menemui Presiden Soeharto (September); dan penandatanganan kesepakatan untuk pemeliharaan keamanan (*Agreement on Maintaining Security*).¹¹

Dari gambaran di atas dapat dikatakan secara ringkas bahwa meskipun secara geografis Australia dan Indonesia berdekatan, namun perbedaan dalam cara memandang suatu peristiwa menyebabkan sifat ketetanggaan dua negara tersebut menjadi kabur, sekaligus unik dan spesifik.¹² Kekaburan ini menyebabkan hubungan di antara keduanya berfluktuasi naik turun tak menentu dan digambarkan seperti berada di atas *roller coaster*. Menyadari akan hal ini, kedua negara terlihat selalu menciptakan sebuah landasan pemahaman untuk mengupayakan terciptanya persahabatan dan hubungan yang stabil-dinamis. Dalam konteks ini, pers memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi wahana untuk mencapai tujuan tersebut.

LIPUTAN PERS

Dua kutub penting untuk menggambarkan perbedaan penilaian terhadap liputan pers Australia dan pers Indonesia dapat ditelusuri dari tulisan Ratih Hardjono dan Peter Rodgers. Hardjono menggambarkan bahwa media Australia sepertinya memiliki perasaan bertanggung-jawab untuk secara mekanis mensupervisi pemerintah. Lebih jauh ia menulis:

“... For that reason the media are generally regarded as being aggressive, fond of conflict, and eager to get to the core of issues very quickly. ..., they sometimes jump to conclusions too rapidly and draw inferences that later prove inaccurate. ..., their search for the truth is indeed a positive element but the ways in which they go seeking are not necessarily honest or objective. Among the Australian media themselves there has arisen an image of ‘heroism’ because of the courage they display in trying to get at the truth, for who will reveal the mistakes of the government if the media do not do so?... The ‘supervisory’ role of the Australian media means that they often seem to work against the government and focus only on things that are negative.... As a result, the reports that are published are not infrequently one-sided.”¹³

¹¹ Purwokinanti, *Op. Cit.*, hal. 52-65.

¹² Gareth Evans dan Bruce Grant, 1991, *Australia's Foreign Relations*, Melbourne University Press, Melbourne, hal 183-185.

¹³ Lihat Hardjono, *Op. Cit.*, hal. 188-189.

Di lain pihak, Rodgers menggambarkan kondisi pers Indonesia dengan mempertanyakan realitas dari makna: pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam pandangannya:

“There is a striking disparity between the legal basis for domestic press operations and what happens in practice. Rights and restrictions on press activity are codified in a number of documents dating back to the Dutch colonial presence in Indonesia. Certain practices, flowing from what are clearly official concerns to restrain the independence of the press for political reasons, conflict with, impinge on and/or override important areas of the legal provisions.... Perhaps the most commonly heard official definition on the Indonesian press is that it is ‘free but responsible’, with freedom including the ‘right to publish’. ‘Responsibility’ is a complex and somewhat emotive issue affecting...”¹⁴

Dua pernyataan evaluatif di atas membuka sebuah jendela yang memberi peluang untuk melihat “ketidakakuran” liputan pers di dua negara bertetangga tersebut.. Hal ini sekaligus membantu untuk melihat persamaan dan perbedaan liputan persnya. Koverasi berita pers kedua negara terhadap peristiwa politik yang terjadi pada bulan Nopember 1991 di Timtim dapat dijadikan sebagai contoh. Selama terjadinya kerusuhan Nopember 1991 di Timtim,¹⁵ pemberitaan pers asing (termasuk pers Australia) oleh Indonesia dipandang mendeskreditkan pemerintah Indonesia, bersifat menyerang,¹⁶ serta tidak sesuai fakta sehingga menguntungkan pihak lain di luar Indonesia. Dasar dari pandangan ini terletak pada persepsi Indonesia tentang isi pers asing yang menilai buruk Indonesia dan terkesan menghasut untuk menyudutkan Indonesia di dunia internasional. Selain itu, jumlah korban yang diberitakan pers asing cukup besar, padahal penyelidikan resmi belum dilakukan.¹⁷

¹⁴ Peter Rodgers, 1982, *The Domestic and Foreign Press in Indonesia: “Free But Responsible”*, Research Paper No. 18, The University of New South Wales, Sydney, hal. 5-6.

¹⁵ Indonesia menyebut kerusuhan itu dengan ‘insiden’, sementara pihak luar menyebutnya dengan ‘pembunuhan massal’, ‘mandi darah’ dan ‘tragedi’. Sebagai contoh lihat *“Massacre on Our Doorstep”*, di harian *The Sydney Morning Herald*, 14 Nopember 1991, hal. 1.

¹⁶ “Alat: Berita di Luar Memojokkan”, di harian *Jawa Pos*, 16 Nopember 1991, hal. 1.

¹⁷ Kebanyakan berita yang diterbitkan pers asing menyebut angka di atas 100 nyawa korban. Beberapa di antaranya dengan mengutip sumber dari Amnesti Internasional, sementara salah seorang staf KBRI di Canberra menyangkal dengan mengatakan bahwa Amnesti Internasional tak pernah ke Timor Timur sehingga informasi dari mereka juga tidak akurat.

Di lain pihak, pemberitaan pers Indonesia dipandang oleh pihak asing juga tidak sesuai kenyataan,¹⁸ terlalu mengekor pernyataan resmi pemerintah Indonesia dan semakin mempertajam keraguan orang terhadap makna 'bebas yang bertanggung jawab'. Landasan tuduhan terhadap liputan pers Indonesia terutama diletakkan pada jumlah korban yang sedikit dan lebih banyak mengutip sumber berita dari saluran informasi rutin.¹⁹ Kecaman terhadap pers Indonesia ini pun diperlebar dengan kecaman lain terhadap pers di negara-negara ASEAN yang cenderung membisu untuk menjaga hubungan antarnegara anggota ASEAN.²⁰

Dari contoh di atas, secara umum terlihat rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap liputan pers mereka. Artinya, masing-masing pihak merasa keberatan dengan isi berita pers negara lain dan bila ini dirunut lebih jauh akan bermuara pada penerapan sistem pers, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Australia dan Indonesia pada prinsipnya mengadopsi sistem pers yang sama, yaitu sistem pers tanggung jawab sosial. Pada pers Australia, hal itu tercermin dari kode etik Persatuan Wartawan Australia (AJA) dan prinsip-prinsip Dewan Pers Australia (APC)²¹ yang menjadi landasan untuk kebebasan pers mereka. Sedangkan sistem pers Indonesia tercermin dari esensi "pers yang sehat" yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab.²²

Kedua, meskipun mengadopsi sistem pers yang sama namun terdapat perbedaan dalam penerapannya yang disebabkan oleh hal-hal berikut: pemaknaan yang berbeda terhadap *term* kebebasan dan *term* tanggung jawab; landasan sistem politik dan sistem sosial yang mewadahi sistem pers; serta variasi latar belakang budaya dan politik antara orang-orang Australia dan orang-orang Indonesia.

¹⁸ Lihat "Uskup Belo Tak Hentikan Kegemarannya Bersiul", di harian *Surya*, 29 Nopember 1991, hal. 1.

¹⁹ Jumlah korban kerusuhan menurut versi pemberitaan pers Indonesia di bawah angka 100. Sebagai contoh lihat "Korban Tewas GPK 19 Orang", di harian *Jawa Pos* dan "Timtim Tetap Terbuka", di harian *Kompas*, edisi 1 Nopember 1991, hal 1.

²⁰ Lihat "Muted Reaction Reflects ASEAN Sensitivity", di harian *The Australian*, 15 Nopember 1991, hal. 8.

²¹ Lihat Schultz, Julianne, 1990, *Accuracy in Australian Newspapers*, Working Paper No. 1 Australian Centre for Independent Journalism, University of Technology, Sydney, hal. 74.

²² F. Rachmadi, 1990, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, hal. 197-198.

Ketiga, penerapan makna kebebasan dan tanggung jawab di Indonesia melahirkan sebuah perilaku pers yang bebas-terbatas (biasanya ditemplei predikat adat ketimuran) dan justru kekurangberanian untuk bertanggung jawab (lebih baik tidak “menyentuhnya” daripada harus dimintai atau dikenai tanggung jawab). Di Australia, hal yang sama justru melahirkan perilaku, meminjam istilah Hardjono, agresif, tidak takut atau bahkan menyukai konflik, memandori pihak lain dan berlomba-lomba menjadi *hero*.²³

Keempat, sistem pers yang sama dalam kenyataannya tidak berada dalam wadah sistem politik dan sistem sosial yang sama, yang ditunjukkan dengan posisi pers Indonesia yang “melayang” di antara gaya bebas Barat dan kecenderungan otoritatif,²⁴ sedang posisi pers Australia sebaring dengan sub-sistem kehidupan yang lain serta memainkan peranan yang esensial dalam wadahnya tersebut.²⁵ Setidaknya seperti kondisi yang mau tidak mau membuat Pemerintah Australia menempatkan secara tinggi hak warga negara dan kelompok, termasuk media, untuk mengekspresikan dan mengkritik pendapat.²⁶

Kelima, perbedaan latar belakang politik dan budaya tersebut secara tidak langsung mempengaruhi gaya dan cara seseorang atau kelompok dalam mengekspresikan pendapat mereka, termasuk seperti yang dilakukan oleh pers dan pihak lain yang memanfaatkan aktivitas pers.²⁷ Jika kultur Indonesia menempatkan penghormatan terhadap *the elder* dan *the leader*, Hardjono memperkirakan gaya Australia dipengaruhi oleh gaya Irlandia, tempat asal sebagian besar penduduk Australia, yang menggemari perdebatan.²⁸

Secara sederhana, saling keberatan terhadap isi pemberitaan pers dengan kelima penjabarannya di atas memang bisa diterima. Impresi yang biasanya diperoleh dari orang-orang yang membaca pers kedua negara mengarah pada persetujuan terhadap pandangan di atas. Dengan kata lain, ketidakakuran pemberitaan pers — dengan sejumlah peristiwa politik yang dijadikan obyek beritanya — relatif bisa dipahami.

²³ Hardjono, *Op. Cit.*, hal. 188-189.

²⁴ Rodgers, *Op. Cit.*, hal. 3.

²⁵ Christopher Warren, 1991, “Closures, Sackings-the Limits of Media Diversity” dalam Australian Centre for Independent Journalism, *Competition and Diversity in Australia's Print Media*, University of Technology, Sydney, hal. 14.

²⁶ Prajarto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 29.

²⁷ *Ibid.*, hal. 33-36.

²⁸ Hardjono, *Op. Cit.*, p. 187-188.

Akan tetapi terdapat faktor lain yang bisa dipakai untuk menyanggah eksis tidaknya ketidakakuran itu. Intinya terletak pada diterima atau ditolaknya rasionalitas dan *public opinion* tentang penyebab “perselisihan”. Secara nalar, lima butir di atas memang mengarah pada permakluman bahwa perbedaan itu menyebabkan kontroversi dan konflik pemberitaan pers di antara negara bertetangga. Pendapat publik mayoritas pun akan cenderung membenarkan sinyalemen yang ada. Masalahnya, rasionalitas sering “menjebak” dan mengarah pada permakluman dan *majority public opinion* yang terjadi pun harus “dicurigai” keasalannya; spontan dari publik (*primary public opinion*) atau direkayasa oleh pendapat birokrat yang kemudian tersiar lewat media massa (*secondary public opinion*).

Selain itu, dari studi yang mencoba membandingkan koverasi berita pers kedua negara justru memberikan indikasi bahwa liputan pers di kedua negara sudah mendasarkan diri pada standar profesional jurnalistik. Pencermatan terhadap liputan pers sewaktu peristiwa Dili Nopember 1991 dan dinamika hubungan bilateral Indonesia-Australia pada tahun 1995 menunjukkan telah dipakainya standar profesional jurnalistik itu,²⁹ sehingga saling keberatan terhadap liputan pers negara bertetangga mestinya tidaklah terjadi (lihat tabel-tabel berikut).

Tabel 1
Tingkat Kelengkapan Berita, Koverasi Kasus Dili 1991

Pers	Baik	Cukup	Buruk	Total Baris
Indonesia	665 (93,3%)	48 (6,7%)	0 (0)	713 (66,3%)
Australia	301 (82,9%)	59 (16,3%)	3 (0,8%)	363 (33,7%)
Total Kolom	966 (89,8%)	107 (9,9%)	3 (0,3%)	1076 (100%)

X kwadrat = 30,689, $df = 2$, $p < 0,000$

Sumber : Diolah dari tesis Prajarto, 1995, hal. 168.

²⁹ Lihat hasil penelitian yang tertuang dalam tesis berjudul “*Australian and Indonesian News Coverage of the Dili Massacre*” dan skripsi yang berjudul “*Sikap Pers Indonesia dan Pers Australia Terhadap Hubungan Indonesia-Australia 1995*”.

Dalam hal kelengkapan berita (peliputan peristiwa Dili 1991), secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara pers Australia dan pers Indonesia ($p < 0,000$). Tetapi, seperti terlihat dalam tabel 1, secara umum kelengkapan berita yang ditampilkan oleh pers Australia dan pers Indonesia pada waktu meliput kasus ini sudah baik. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dari formula 5W+H (*what, who, where, when, why* dan *how*) tertampang pada aitem berita mereka. Hanya sedikit aitem informasi yang terkategori buruk (menggunakan 3 unsur dari formula 5W+H atau lebih kecil lagi) ditemukan pada pers Australia sewaktu meliput peristiwa Dili 1991.

Gambaran yang serupa terlihat pula dalam liputan pers kedua negara ketika menyoroti hubungan Australia-Indonesia pada tahun 1995 (lihat tabel 2).

Tabel 2
Tingkat Kelengkapan Berita : Koverasi Hubungan Bilateral 1995

Pers	Baik	Cukup	Buruk	Total Baris
Indonesia	62 77,5%	18 22,5%	0 0,0%	80 40,0%
Australia	105 87,5%	15 12,5%	0 0,0%	120 60%
Total Kolom	167 83,5%	33 16,5%	0 0,0%	200 100,0%

χ^2 kwadrat = 3,48394, $df = 2$, $p < 0,061$

Sumber : Diolah dari skripsi Purwokinanti, 1997, hal. 112.

Aitem informasi yang diberikan pers Australia dan pers Indonesia sewaktu meliput rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1995 juga sudah baik dalam penerapan formula 5W+H. Hasil penelitian Purwokinanti ini bahkan menunjukkan tidak ditemukannya aitem informasi yang terkategori buruk. Di samping itu, berdasar perhitungan statistik, tidak ada perbedaan nyata antara pers Australia dan pers Indonesia dalam upaya pemenuhan kelengkapan formula 5W+H itu ($p < 0,061$).

Dalam hal tingkat pemakaian nilai berita (*news values*), dalam hal mewartakan peristiwa Dili 1991 dan hubungan bilateral 1995, pers di kedua negara menunjukkan kecenderungan telah dipakainya *news values* itu secara

baik. Pada dua kajian yang dilakukan, pencermatan dilakukan terhadap penggunaan *news values* standar yang umumnya perlu ada dalam sebuah aitem informasi: *significance, timeliness, magnitude, prominence, proximity* dan *human interest*. Dengan mempertimbangkan bahwa nilai berita *human interest* tidak selalu menyertai nilai berita-nilai berita lainnya dalam suatu aitem informasi, maka penggunaan empat atau lebih nilai berita dikategorikan sebagai penggunaan yang maksimal (lihat tabel 3 dan tabel 4).

Tabel 3
Tingkat Pemakaian Nilai Berita: Koverasi Kasus Dili 1991

Pers	Maksimal	Minimal	Total Baris
Indonesia	713 100,0%	0 0,0%	713 66,3%
Australia	350 96,4%	13 3,6%	363 33,7%
Total Kolom	1063 98,8%	13 1,2%	1076 100,0%

$X \text{ kwadrat} = 22,933, df = 1, p < 0,000$

Sumber: diolah dari tesis Prajarto, 1995, hal. 172.

Tabel 4
Tingkat Pemakaian Nilai Berita: Koverasi Hubungan Bilateral 1995

Pers	Maksimal	Minimal	Total Baris
Indonesia	78 97,5%	2 2,5%	80 40,0%
Australia	114 95,0%	6 5,0%	120 60,0%
Total Kolom	192 96,0%	8 4,0%	200 100,0%

$X \text{ kwadrat} = 0,78125, df = 1, p < 0,376$

Sumber: diolah dari skripsi Purwokinanti, 1997, hal. 117.

Meskipun terdapat variasi perbedaan dari hasil uji statistik ($p < 0,000$ dan $p < 0,376$), tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar aitem informasi yang berkait dengan peristiwa Dili 1991 dan hubungan bilateral 1995 telah berusaha menggunakan *news values* secara maksimal. Dari observasi lebih ke dalam lagi, perbedaan dalam hal penggunaan *news values* justru terletak pada jenis *news values* yang difavoritkan. Jika *timeliness* dan *significance* merupakan jenis *news values* yang harus selalu ada dan paling sering muncul, maka tekanan atau pemfavoritan *news values* pers Australia lebih condong ke *magnitude*, utamanya jika berkait dengan jumlah korban atau orang yang terlibat, sementara pers Indonesia lebih cenderung ke *prominence*. Secara empirik, perbedaan pemfavoritan ini memang belum digali, namun dugaan yang bisa diajukan adalah bahwa pers Indonesia cenderung bertumpu pada kredibilitas sumber berita, utamanya kalangan birokrat, sementara pers Australia pada kekokohan data.

Harus diakui, pencermatan dengan melihat penerapan standar profesional jurnalistik memang tidak boleh hanya berlandaskan pada masalah kelengkapan berita berdasar formula 5W+H serta *news values* belaka. Empat tabel yang ditampilkan di atas hanya merupakan bagian dari tabel-tabel lain yang perlu pula disimak dan antara lain berkait dengan masalah *news-coverage*, *angle*, dimensi, *news peg* dan *news worthiness*.³⁰

Hal yang tetap menjadi permasalahan dalam mengkaji persamaan dan perbedaan pers negara bertetangga sebenarnya kembali pada masalah kebenaran dan akurasi isi berita pers. Seperti dinyatakan Vos, tak ada hal lain yang dituntut dari pers selain masalah kebenaran³¹. Kebenaran ini bersangkut paut dengan masalah akurasi isi. Sepanjang pengingkaran terhadap masalah kebenaran dan akurasi itu terus berlangsung dan dibiarkan atau malah sengaja dibiarkan, jurang menganga yang berisi keberatan suatu negara terhadap liputan pers negara lain akan selalu ada.

³⁰ Untuk lebih lengkapnya, lihat tesis Prajarto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 138-210 dan skripsi Purwokinanti, *Op. Cit.*, hal. 90-136.

³¹ Mei Li Vos, "Nothing but the Truth Demanded from Press" di harian *The Jakarta Post*, 10 Januari 1994, hal. 4.

PENUTUP

Dengan berbagai latar peristiwa yang disoroti, kajian berfokus pada Indonesia dan Australia selalu menghadirkan hal-hal yang unik. Secara faktual, meskipun dalam posisi geografis yang berdekatan, sejumlah perbedaan selalu mengemuka di antara keduanya. Dalam perjalanan waktu, kontroversi, ketegangan dan konflik mewarnai hubungan kedua negara sejak keduanya menjalin kontak, yang berjalan paralel pula dengan persamaan pandangan, kesepakatan dan kedekatan secara harmonis atas dasar kepentingan masing-masing.

Ups and downs evaluasi terhadap liputan pers Australia dan Indonesia pun tak berbeda dengan hubungan kedua negara itu. Pada kurun waktu tertentu, liputan pers Indonesia sering dikecam dengan tidak sesuai fakta, tidak bebas, dan lebih berfungsi sebagai corong pemerintah. Di lain sisi, liputan pers Australia pun dikecam sebagai pers yang agresif, suka konflik dan kadang sensasi, terlalu memandori urusan negara lain dan mendeskreditkan pihak lain. Pada kurun waktu yang lain, hubungan dalam dunia informasi pers Australia dan pers Indonesia berjalan harmonis. Saling membantu dan saling mengevaluasi.

Tulisan ini telah mencoba menghadirkan sejumlah eksplanasi tentang liputan pers negara bertetangga (Indonesia dan Australia). Dari sisi perasionalan dan penerimaan terhadap opini publik, persamaan dan perbedaan liputan pers kedua negara dapatlah diterima. Sedang dari kaji empirik dengan mendasarkan pada penerapan standar profesional jurnalistik, hal yang terlihat justru kecenderungan besar bahwa pers kedua negara pada prinsipnya telah sama-sama mencobanya secara maksimal. Bila persoalan kemudian dikembalikan pada masalah kebenaran dan akurasi isi berita, kiranya hal ini bisa membuka peluang lain untuk mendiskusikan liputan pers kedua negara bertetangga ini secara komprehensif.

Referensi

- Evans, Gareth dan Bruce Grant, 1991, *Australia's Foreign Relations*, Melbourne University Press, Melbourne.
- Hardjono, Ratih, 1993, *White Tribe of Asia*, Hyland House, South Yarra.
- Hill, Helen, 1975, *The Timor Story*, Timor Information Service, Fitzroy.
- Prajarto, Y.A. Nunung, 1995, *Australian and Indonesian News Coverage of the Dili Massacre*, tesis, The University of New South Wales, Sydney.
- , 1993, *The Dili Massacre*, tesis, The University of New South Wales, Sydney.
- Purwokinanti, Florentina, 1997, *Sikap Pers Indonesia dan Pers Australia terhadap Hubungan Indonesia-Australia 1995*, skripsi, FISIPOL - UGM, Yogyakarta.
- Rachmadi, F., 1990, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta.
- Rodgers, Peter, 1982, *The Domestic and Foreign Press in Indonesia: "Free But Responsible"*, Research Paper No. 18, The University of New South Wales, Sydney.
- Schultz, Julianne, 1990, *Accuracy in Australian Newspapers*, Working Paper No. 1 Australian Centre for Independent Journalism, University of Technology, Sydney.
- Tiffen, Rodney, 1978, *The News from Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Warren, Christopher, 1991, "Closures, Sackings-the Limits of Media Diversity" dalam Australian Centre for Independent Journalism, *Competition and Diversity in Australia's Print Media*, University of Technology, Sydney.
- Artikel dan Berita Surat Kabar*
- Bhakti, Ikrar Nusa, "Pertemuan Akhir Pekan Soeharto-Keating", di harian *Kompas*, 16 September 1995, hal. 4.
- Bromby, Robyn, "Sister-State Relationship a Powerful Two-way Weapon", di harian *The Australian*, 24 September 1993, hal. 11.
- Prajarto, Nunung, "Mengapa Paul Keating Melirik Asia?", di harian *Surabaya Post*, 1 Oktober 1992, hal. 4.
- Vos, Mei Li, "Nothing but the Truth Demanded from Press" di harian *The Jakarta Post*, 10 Januari 1994, hal. 4.
- "Massacre on Our Doorstep", di harian *The Sydney Morning Herald*, 14 Nopember 1991, hal. 1.
- "Alas: Berita di Luar Memojokkan", di harian *Jawa Pos*, 16 Nopember 1991, hal. 1.
- "Uskup Belo Tak Hentikan Kegemarannya Bersiul", di harian *Surya*, 29 Nopember 1991, hal. 1.
- "Korban Tewas GPK 19 Orang", di harian *Jawa Pos*, 1 Nopember 1991, hal 1 dan "Timtim Tetap Terbuka", di harian *Kompas*, 1 Nopember 1991, hal 1.
- "Muted Reaction Reflects ASEAN Sensitivity", di harian *The Australian*, 15 Nopember 1991, hal. 8.